

SISTEM PELAYANAN TERPADU: PERSPEKTIF BIAYA TRANSAKSI PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI KABUPATEN KLATEN

Riwi Sumantyo

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret Surakarta
(riwi_s@yahoo.com)

Abstract

This study aims to analyze the influence of the variables: cost of searching for information, contract costs, monitoring costs, and the cost of adaptation to the policy of investment services provided by the government to the business community in Klaten, Central Java. This research is important because the era of regional autonomy of each region are working hard to boost revenue as through efforts to attract inward investors.

Quantitative approach was chosen to be the model of this study. Quantitative approach is used for the analysis of the effect of independent variables on the test response variable. The analytical tool used is multiple linear regression. The processed data is collected through a field survey with questionnaires spread of formal questions to the business community in all district of Klaten, Central Java.

The results indicate that the variable cost information, contract costs, and the cost of adaptation has positive influence on the policy of investment services in Klaten. While the cost of monitoring a variable does not affect the policy of investment services. Based on the results of the analysis, it is necessary that clear regulations governing the issue of transaction costs.

Keywords: *transaction costs, integrated service system, investment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel-variabel sebagai berikut: biaya informasi, biaya kontrak, biaya monitoring, dan biaya adaptasi kebijakan yang harus disediakan oleh pelaku usaha di Klaten, Jawa Tengah. Riset ini penting karena pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, masing-masing daerah bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai upaya untuk menarik investor masuk ke daerah tersebut.

Pendekatan kuantitatif dipilih dalam studi ini. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dampak dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang diolah, dikumpulkan melalui survei

lapangan dengan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terhadap pelaku usaha di wilayah Klaten, Jawa Tengah.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa variabel biaya informasi, biaya kontrak, dan biaya adaptasi kebijakan berpengaruh positif terhadap kebijakan pelayanan investasi di Klaten. Sedangkan biaya monitoring tidak berpengaruh terhadap kebijakan pelayanan investasi di Klaten. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengawal isu biaya transaksi yang ada.

Kata kunci: biaya transaksi, sistem pelayanan terpadu, investasi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Semenjak bermulanya Otonomi Daerah pada bulan Januari 2001, belum tercapai konsensus mengenai model pelaksanaan otonomi daerah yang efisien dan tepat sasaran. Hal ini tampak jelas dari keputusan pemerintah untuk merevisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dengan membuat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, karena dianggap mengancam harmonisasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, tetap saja masih terdapat banyak pemikiran dan penafsiran pakar ekonomi publik dan pemerintah daerah yang belum terakomodasi. Hal ini bisa dimaklumi mengingat usia otonomi daerah yang masih muda bagi masyarakat Indonesia dibandingkan negara-negara maju seperti Uni Eropa.

Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya birokrasi yang berbelit-belit. Pelaksanaan otonomi yang tidak berjalan dengan baik menciptakan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Permasalahan birokrasi ini semakin mengurangi minat investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah panjangnya jalur birokrasi investasi ini. Pada tanggal 12 April tahun 2004, diterbitkan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Konsekuensi dari Keputusan ini, penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini berarti Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

Pemerintah kembali mengeluarkan keputusan baru pada tanggal 6 Juli 2006, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat

Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Pembinaan sistem ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah daerah banyak yang tidak mengimplementasikan keputusan pelayanan satu pintu tersebut dengan optimal dengan alasan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya infrastruktur, dan sebagainya. Jumlah investor yang akan masuk ke daerah ditentukan sejauh mana daerah tersebut menarik untuk investasi, apakah cukup menjanjikan atau sebaliknya. Hal ini tentu saja menjadi suatu masalah baru dalam iklim investasi.

LPEM-FE UI (2001) menyoroti bahwa Otonomi daerah justru meningkatkan biaya ketidakpastian berusaha (Biaya Transaksi) di Kabupaten/Kota di Indonesia. Studi mengenai Regional Cost of Doing Business Index, diperoleh temuan bahwa cenderung ditolaknya *efficient grease hypothesis*. Artinya, korupsi maupun pungli oleh oknum pemerintah yang dihadapi pengusaha di Indonesia cenderung menurunkan efisiensi ekonomi, bukannya memperlancar transaksi ekonomi. Hal ini ditunjukkan perizinan untuk berusaha di daerah banyak dipegang oleh pemerintah daerah.

Hasil Survei Doing Business di Indonesia 2012 (Memperbandingkan Kebijakan Usaha di 20 Kota dan 183 Perekonomian) yang dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai 90% dari program pelayanan terpadu satu pintu gagal oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah gagal memperbaiki administrasi perizinan di daerah tersebut. Lonjakan jumlah pemda yang menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) tidak berbanding lurus dengan perbaikan kualitas layanan perizinan.

Data KPPOD menyatakan 420 pemerintah daerah dari 524 provinsi/kabupaten/kota yang ada di Indonesia telah mengadopsi PTSP. Sebagian besar PTSP direalisasikan dalam bentuk kantor (269 daerah), disusul oleh badan (109 daerah), unit (38 daerah) dan dinas (4 daerah). Pemantauan atas pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) menunjukkan PTSP tidak memperpendek waktu, menyederhanakan syarat dan menekan biaya pelayanan perizinan.

Hasil pemantauan Kementerian Perdagangan tersebut menyatakan 53% dari daerah di atas yang bisa mengeluarkan SIUP dalam 3 hari kerja atau sesuai ambang maksimal kepengurusan yang ditentukan pemerintah pusat. Survei pada 100 kabupaten/kota juga menunjukkan hanya 23% daerah yang tidak memungut biaya pengurusan SIUP, sedangkan pengurusan TDP hanya gratis di 19 daerah. Pantauan tersebut juga membuktikan 90% daerah meminta lebih banyak syarat pengurusan SIUP dari ketentuan pemerintah dengan alasan perbedaan kondisi lokal atau untuk memenuhi permintaan warga di sekitar lokasi usaha.

Sejak tahun 2009 pemerintah mencoba untuk menekan biaya transaksi melalui UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini berfungsi sebagai regulasi dalam menciptakan *governance* yang ideal. Sehingga bertujuan agar, namun

pada kenyataannya, regulasi yang telah ada belum cukup kuat untuk menekan biaya transaksi. Hal itu terbukti bahwa hingga saat ini masih ditemukan biaya transaksi dalam pelayanan perizinan usaha yang berbelit-belit dan rentan dengan pungutan liar.

Survei kabupaten/kota terbaik di Indonesia untuk bidang pelayanan penanaman modal Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten berada pada posisi 39 peringkat kabupaten terbaik bidang pelayanan penanaman modal. Penelitian ini dimaksudkan bahwa selama ini masih sedikit penggunaan teori ekonomi kelembagaan baru (EKB) dalam menganalisis permasalahan terkait biaya transaksi dan investasi daerah.

Transaction cost (biaya transaksi) merupakan konsep yang menjelaskan mengenai biaya yang keluar saat melakukan transaksi diluar biaya produksi. Pasar menunjukkan bahwa dalam pertukaran ternyata tidak hanya memperhitungkan berapa biaya yang dihabiskan untuk memproduksi suatu barang tetapi juga harus menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan transaksi/pertukaran termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh izin usaha.

Biaya transaksi akan mengakibatkan total biaya semakin meningkat. Semakin kecil biaya transaksi yang bisa ditekan maka akan semakin kecil total biaya. Hal ini akan berpengaruh terhadap investasi dan kemudahan usaha sehingga ada keterkaitan antara biaya transaksi yang tinggi dengan investasi.

Biaya transaksi menandai munculnya aliran *New Institutional Economie* (NIE) yang menyatakan bahwa jika transaksi dilupakan maka aktivitas organisasi ekonomi akan tidak relevan karena keuntungan suatu bentuk organisasi akan dengan mudah dieliminasi oleh kontrak tanpa biaya.

Biaya transaksi muncul, karena adanya kontrak antara pihak satu dengan pihak lainnya, antara lembaga satu dengan lainnya, antara individu dengan lembaga dan sebagainya. Menurut Jaya (2003), paradigma analisis biaya transaksi bermula dari fundamental keberadaan perusahaan yaitu biaya yang digunakan dalam penetapan sistem harga untuk mengkoordinasi kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi sebuah pengertian yang sebagian besar berkaitan dengan model dari biaya transaksi. Coasc juga mengakui bahwa pasar dan organisasi merupakan alternatif dalam pertukaran organisasi ekonomi. Ketidakpastian (*uncertainty*) dan perilaku oportunistik (*oppommism*) juga dapat meningkatkan biaya yang digunakan dalam sistem harga. Perekonomian yang didasarkan atas mekanisme harga tersebut (dalam hal ini harga akan bertindak sebagai koordinator) pada gilirannya akan mendorong barang atau jasa menjadi sangat menguntungkan konsumen yang bersangkutan.

Menurut Williamson (2000) mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya untuk menjalankan sistem ekonomi selain itu, biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Biaya transaksi disebutkan sebagai biaya untuk menspesifikasi dan memaksakan kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga dengan sendirinya mencakup biaya organisasi politik dan ekonomi. Dengan demikian, meliputi biaya negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran.

Adapun jenis biaya transaksi menurut Korchner dan Picot dalam (Bouty, 2010:21):

1. **Biaya pencarian informasi:** biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh informasi mengenai barang yang diinginkan dari pasar.
2. **Biaya negosiasi dan keputusan kontrak (*bargaining cost*):** biaya yang diperlukan untuk menerima suatu persetujuan/kontrak dengan pihak lain atas suatu transaksi.
3. **Biaya pengawasan/monitoring:** biaya yang ditimbulkan karena adanya kegiatan untuk mengawasi pihak lain dalam melaksanakan kontrak.
4. **Biaya adaptasi** (selama pelaksanaan kesepakatan): biaya yang ditimbulkan karena dilakukannya penyesuaian-penyesuaian pada saat suatu kesepakatan transaksi dilakukan.

Karakteristik transaksi mempengaruhi besaran biaya transaksi. Menurut Jaya (2003) ada tiga karakteristik transaksi yang penting, yaitu: **Ketidakpastian (*uncertainty*)**, terutama terkait dengan produksi, supply, demand, fluktuasi harga, iklim, kondisi lapangan, dan lain-lain. **Frekuensi**, tergantung pada keadaan dan kemampuan produksi. Produk pertanian, perikanan, sangat tergantung pada musim. Transaksi pada musim panen atau musim ikan melimpah berbeda dengan transaksi pada musim paceklik. **Spesifitas**, yang meliputi *site specificity*, *physical asset specificity*, *human asset specificity*. Asset yang spesifik membatasi kegiatan tertentu yang memiliki transaksi yang terbatas.

Dasar hukum Kantor Pelayanan Terpadu Dasar Hukum yaitu Keputusan Presiden No. 29 tahun 2004. Keppres ini merupakan bagian yang berhubungan dengan cara-cara menangani investasi melalui pendekatan "one-stop" atau "one-roof" (Sistem Pelayanan Satu Atap). Dalam pembukaannya, peraturan ini menyatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam mendatangkan investor dalam berinvestasi di Indonesia, ada kebutuhan untuk menyederhanakan prosedur investasi dengan menggunakan pendekatan OSS (*one-stop service*). Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa sehubungan dengan peraturan 22/1999 Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 (dalam fungsi pemerintahan pusat dan propinsi), terdapat suatu kebutuhan untuk mengklarifikasi prosedur pelayanan bagi investasi luar dan dalam negeri.

Dasar hukum yang lain Sistem Pelayanan Satu Pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 secara khusus, pemerintah melihat perlunya perubahan dalam pelayanan OSS terutama bagi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. Melalui peraturan ini dibentuk pedoman pelayanan satu pintu yang diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah transparan pasti dan terjangkau.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk melihat kondisi pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu terhadap masyarakat bisnis di Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengetahui pengaruh biaya transaksi terhadap peningkatan investasi daerah di Kabupaten Klaten.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metoda survei lapangan yang bermaksud memberikan gambaran tentang tanggapan dari perwakilan sektor bisnis terhadap pelayanan kantor pelayanan terpadu. Pelaksanaan survey memakai kuesioner yang akan diaplikasikan kepada individu yang akan memberikan respon dan berbicara mewakili perusahaannya. Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini dikonsentrasikan pada tipe perusahaan atau bisnis dan ukuran perusahaan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada bagian ini dianggap sebagai bagian yang paling relevan dengan sektor bisnis. Tujuan dari pertanyaan bagian ini adalah untuk mengidentifikasi proporsi responden yang terhadap pelayanan yang diberikan kantor pelayanan terpadu. Pertanyaan-pertanyaan pelayanan dasar mencakup masalah administrasi, yaitu masalah perizinan.

Sampel dipilih secara acak dari sumber data Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kadinda dan asosiasi bisnis lainnya yang dibentuk oleh para pengusaha daerah Kabupaten Klaten. Memilih sampel secara acak berarti proses penentuan sampel memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Untuk dapat menentukan sampel secara acak, maka harus memiliki daftar nama seluruh populasi pengusaha daerah dan pemilihan akan dilakukan dengan melihat pada daftar tersebut. Pemilihan sampel secara acak dapat dilakukan dengan bantuan tabel angka acak yang terdapat di buku-buku statistik atau dengan teknik random lainnya. Yang menjadi perhatian adalah keterwakilan berbagai jenis usaha (sektor) dalam pemilihan sampel dan lokasinya mencakup semua kecamatan yang ada di kabupaten/kota tersebut. Metoda *random sampling* yang diterapkan secara benar akan menghasilkan sampel yang representatif.

Analisis data tidak akan dilakukan secara mendalam. Dengan jumlah pengusaha daerah yang relatif kecil, jumlah pebisnis yang dianggap representatif di bidang bisnis sepertinya terlalu kecil untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi, oleh karena itu, hasil survei mungkin, dianggap lebih bersifat indikatif daripada catatan yang dapat dipercaya tentang sikap semua sektor bisnis lokal.

Data akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Struktur analisis yang utama akan mengikuti struktur sebagai berikut:

Data Responden

Responden yang menjawab kuesioner berbicara setidaknya mewakili entitas bisnis dari perusahaan tempat dia bekerja atau mungkin memiliki perusahaan. Oleh karena itu,

informasi responden terbatas pada tipe perusahaan, besar kecilnya perusahaan dan posisi apa yang diduduki responden di perusahaan tersebut. Data tipe perusahaan dapat dikombinasikan dengan jumlah pekerja, sehingga terdapat 24 kombinasi yang berbeda-beda, jika kita mengelompokkan jawaban tentang jumlah pegawai menurut empat tipe perusahaan sebagai berikut:

1. Pengelolaan perusahaan dilakukan sendiri
2. Pemilik dengan 10 karyawan atau kurang (kecil)
3. Pemilik dengan 50 karyawan atau kurang (sedang)
4. Pemilik dengan lebih dari 50 karyawan (besar)

Data lain tentang lokasi bisnis diperlakukan sebagai hal yang mempengaruhi secara langsung, untuk membantu pengguna survei dalam memeriksa seberapa representatif sampel tersebut. Data tentang posisi responden mungkin akan digunakan jika *cross check* diperlukan berkenaan dengan kualitas jawaban. Data-data tersebut memungkinkan analisis yang lebih detail, berdasarkan ukuran perusahaan atau tipe industri.

Alat Analisis

1. Pengukuran Skala Sikap

Untuk menganalisis bagaimana persepsi terhadap model maka setiap jawaban responden dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap. Dukungan sikap ini diungkapkan menjadi 5 poin likert tipe *scale* (skala likert), mulai dari poin satu hingga poin lima. yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju ataupun sangat puas, puas, ragu-ragu, tidak puas dan sangat tidak puas.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata.

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi responden dari waktu ke waktu dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, alat pengukur tersebut dikatakan reliabel. Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama.

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS).

Dalam penelitian ini sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda, akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari : uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

i) Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas *residual* adalah dengan melihat grafik *histogram* yang membandingkan antara data *observasi* dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat *histogram* hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probabilty plot* yang membandingkan distribusi *kumulatif* dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *ploting* data *residual* akan dibandingkan dengan garis diagonal.

ii) Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas *residual* adalah uji statistik *non – parametrik Kolmogorof – Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data *residual* berdistribusi normal

H_A : Data *residual* tidak berdistribusi normal

2) Uji Multikolonieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel *independent* (Ghozali, 2006: 91).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas.

c. Uji Regresi

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan regresi linear regresi berganda, karena penelitian ini ingin mengetahui hubungan variabel secara *parsial* dan juga secara *simultan*. Adapun rumus regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kebijakan Pelayanan Investasi

β_0 = *koefisien Intercept* (menyatakan berapa besar rata – rata Y jika X $\beta=0$)

X₁ = informasi

X₂ = pembuatan kontrak

X₃ = monitoring

X₄ = adaptasi

E = error term

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = *Koefisien Regresi* (Bilangan yang memperhatikan hubungan Linear antara variabel X dan Y, sedemikian rupa sehingga X berubah satu unit, rata-rata Y berubah sebesar *koefisien regresi*).

d. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) dan uji signifikan simultan (uji statistik F).

1) Uji Signifikan *Parameter* Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau *independent* secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependent*. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu *parameter* (b_i) sama dengan nol, atau $H_0 : b_i = 0$.

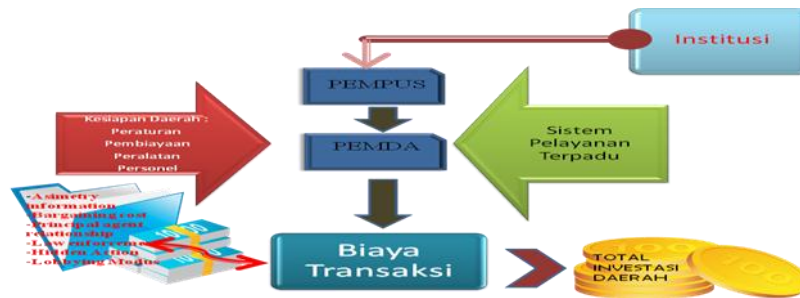
Artinya, apakah suatu variabel *independent* bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependent*. Hipotesis alternatifnya (H_A) *parameter* suatu variabel tidak sama dengan nol atau $H_A : b_i \neq 0$.

Sehingga variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependent*.

2) Uji Signifikan *Simultan* (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel *independent* atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependent* atau terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua *parameter* dalam model sama dengan nol, atau $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$. Artinya, apakah semua variabel *independent* bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependent*. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua *parameter* secara *simultan* sama dengan nol, atau $H_A : b_1 \neq b_2 \dots \neq b_k \neq 0$. Artinya, semua variabel *independent* secara *simultan* merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependent*.

Gambar 1.
Kerangka Teoritis Penelitian



Definisi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pelayanan investasi adalah persepsi masyarakat usaha terhadap pelayanan investasi Pemerintah Kabupaten Klaten.
- 2) Biaya pencarian informasi: biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh informasi mengenai barang yang diinginkan dari dari pasar.
- 3) Biaya negosiasi dan keputusan kontrak (*bargaining cost*): biaya yang diperlukan untuk menerima suatu persetujuan/kontrak dengan pihak lain atas suatu transaksi.
- 4) Biaya pengawasan/monitoring: biaya yang ditimbulkan karena adanya kegiatan untuk mengawasi pihak lain dalam melaksanakan kontrak.
- 5) Biaya adaptasi (selama pelaksanaan kesepakatan): biaya yang ditimbulkan karena dilakukannya penyesuaian-penyesuaian pada saat suatu kesepakatan transaksi dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Responden

Untuk mengatasi permasalahan bias representatif sekaligus menjadi kontrol kualitas pertama dalam penelitian ini, maka sampel diambil dengan tujuan mewakili semua masyarakat bisnis formal yang tersebar di seluruh Kabupaten Klaten. Sehingga tiap-tiap kecamatan diupayakan ada keterwakilan sampel, kecuali di kecamatan yang dimaksud benar-benar tidak terdapat populasi masyarakat bisnis formal.

Tabel 1.
Jumlah Sampel Berdasarkan Keterwakilan Lokasi

No.	Lokasi	Asumsi		Jumlah Sampel
		Populasi	Proporsi	
1.	Bayat	14	2,06	2
2.	Cawas	11	1,62	2
3.	Ceper	40	5,90	6
4.	Delanggu	40	5,90	6

No.	Lokasi	Asumsi		Jumlah Sampel
		Populasi	Proporsi	
5.	Gantiwarno	17	2,51	3
6.	Jatinom	31	4,57	5
7.	Jogonalan	21	3,10	3
8.	Juwiring	16	2,36	2
9.	Kalikotes	10	1,47	1
10.	Karanganom	24	3,54	4
11.	Karangdowo	14	2,06	2
12.	Karangnongko	10	1,47	1
13.	Kebonarum	10	1,47	1
14.	Kemalang	12	1,77	2
15.	Klaten Selatan	39	5,75	6
16.	Klaten Tengah	69	10,18	10
17.	Klaten Utara	80	11,80	12
18.	Manisrenggo	17	2,51	3
19.	Ngawen	32	4,72	5
20.	Pedan	26	3,83	4
21.	Polanharjo	21	3,10	3
22.	Prambanan	17	2,51	3
23.	Trucuk	39	5,75	6
24.	Tulung	21	3,10	3
25.	Wedi	25	3,69	4
26.	Wonosari	22	3,24	3
Jumlah		678	100,00	100

Sumber: Data Primer 2013 (diolah).

Guna mendapatkan data yang menggambarkan persepsi kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Klaten dari ketiga kategori/jenis usaha tersebut, maka masing-masing kategori bisnis harus ada respondennya. Berdasarkan penghimpunan data di lapangan berikut adalah data jumlah responden berdasarkan keterwakilan jenis/kategori usaha:

Tabel 2.
Jumlah Responden Berdasarkan Keterwakilan Jenis Bisnis

Jenis Bisnis	Responden	Proporsi
Industri	31	31,00
Perdagangan	35	35,00
Jasa	34	34,00
Jumlah	100	100,00

Sumber: Data Primer 2013 (diolah).

2. Analisis dan Pembahasan

1) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 16 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Item	Kesimpulan
0,836	5	Reliabel

Sumber: Data Primer (diolah).

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.7 sehingga dapat disimpulkan elemen pertanyaan kuesioner tersebut reliabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

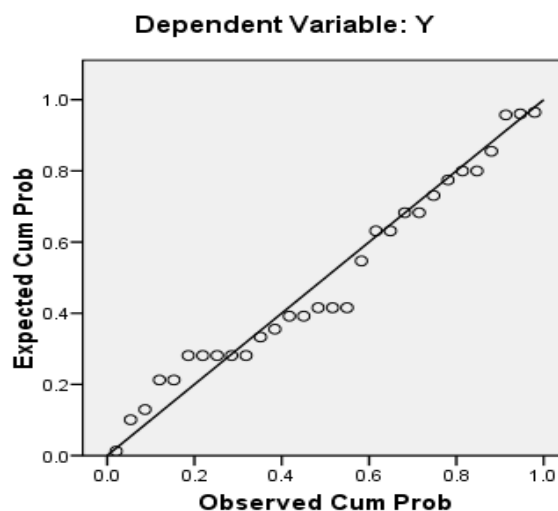
2) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas data dipergunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang dipergunakan adalah plot grafik dimana asumsi normalitas terpenuhi jika titik-titik pada grafik mendekati sumbu diagonalnya.

Gambar 2.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Primer (diolah).

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik telah mendekati atau hampir berhimpit dengan sumbu diagonal atau membentuk sudut 45 derajat dengan garis mendatar. Interpretasinya adalah bahwa nilai residual pada model penelitian telah terdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil pengujian tersebut dipergunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,28104630
Most Extreme Differences	Absolute	,158
	Positive	,158
	Negative	-,100
Kolmogorov-Smirnov Z		,863
Asymp. Sig. (2-tailed)		,446

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber: Data Primer (diolah).

Tampak bahwa nilai signifikansi adalah sebesar $0,446 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa nilai residual telah terdistribusi secara normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF). Model dinyatakan terbebas dari gangguan multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF di bawah 10 atau tolerance di atas 0,1. Berikut adalah uji Multikolinearitas dalam penelitian ini:

Tabel 5.
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	-,088	,440		-,200	,843		
	X1	,293	,086	,341	3,403	,002	,713	1,403
	X2	,277	,111	,255	2,501	,019	,691	1,446
	X3	,111	,104	,127	1,062	,298	,501	1,997
	X4	,385	,087	,491	4,433	,000	,583	1,714

a Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer (diolah).

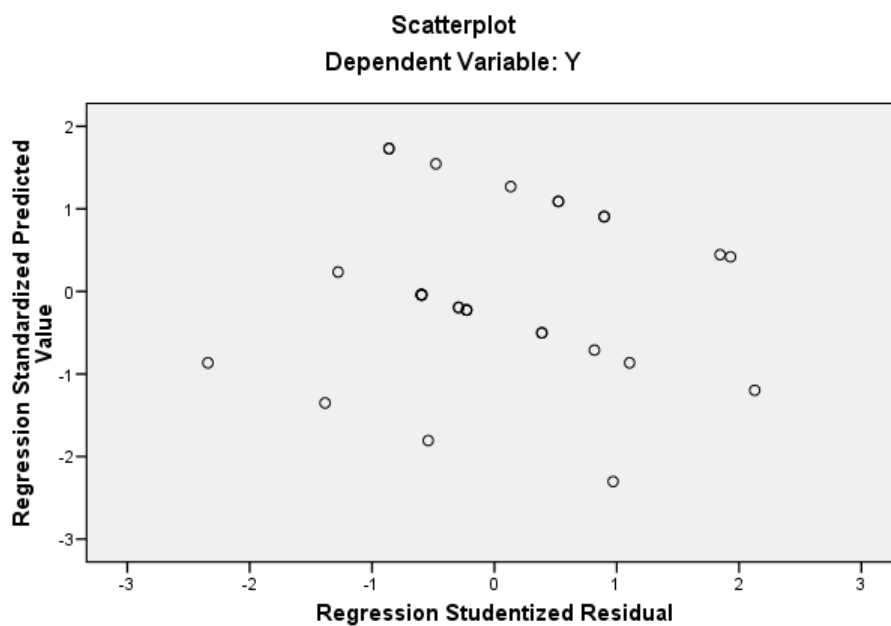
Tabel di atas memberikan semua nilai VIF di bawah 10 atau nilai tolerance di atas 0,1. Berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model dalam penelitian ini.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan memplotkan grafik antara SRESID dengan ZPRED dimana gangguan heteroskedastisitas akan tampak dengan adanya pola tertentu pada grafik. Berikut adalah uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Gambar 3.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer (diolah).

Tampak pada diagram di atas bahwa model penelitian tidak mempunyai gangguan heteroskedastisitas karena tidak ada pola tertentu pada grafik. Titik-titik pada grafik relatif menyebar baik di atas sumbu nol maupun di bawah sumbu nol.

3) Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu terhadap variabel terikatnya yaitu DA secara serempak. Berikut adalah nilai F hitung dalam penelitian ini:

Tabel 6.
Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,509	4	2,627	28,675	,000(a)
	Residual	2,291	25	,092		
	Total	12,800	29			

a Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

b Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer, diolah (SPSS versi 15).

Tampak bahwa nilai F hitung pada model penelitian adalah sebesar 28,675 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi adalah di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pelayanan pada signifikansi 5%.

b. Uji t

Uji t (parsial) adalah untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya. Berikut adalah hasil perhitungan nilai t hitung dan taraf signifikansinya dalam penelitian ini:

Tabel 7.
Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	-,088	,440		-,200	,843		
	X1	,293	,086	,341	3,403	,002	,713	1,403
	X2	,277	,111	,255	2,501	,019	,691	1,446
	X3	,111	,104	,127	1,062	,298	,501	1,997
	X4	,385	,087	,491	4,433	,000	,583	1,714

a Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer (diolah).

Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,088 + 0,293X_1 + 0,277X_2 + 0,111X_3 + 0,385X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kebijakan Pelayanan Investasi

X₁ = Biaya Mencari Informasi

X₂ = Biaya Kontrak

X₃ = Biaya Monitoring

X₄ = Biaya Adaptasi

Hasil interpretasi terhadap persamaan tersebut beserta uji hipotesis akan diberikan sebagai berikut:

X1 memiliki signifikansi $0,022 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya mencari informasi terhadap kebijakan Pelayan Investasi.

X2 memiliki signifikansi $0,019 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya kontrak terhadap kebijakan Pelayan Investasi.

X3 memiliki signifikansi $0,298 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Biaya Monitoring terhadap kebijakan Pelayan Investasi.

X4 memiliki signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya H_0 diterima dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Biaya Adaptasi terhadap kebijakan tarif cukai.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kinerja pemerintah kabupaten melalui sistem pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat bisnis dipandang mengalami peningkatan.
- b) Semua variabel independen yang merupakan variabel dari biaya transaksi berpengaruh pada variabel dependen yaitu kebijakan investasi. Artinya biaya transaksi berpengaruh pada peningkatan investasi daerah di Kabupaten Klaten.

2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka berikut ini diajukan beberapa implikasi kebijakan sebagai berikut:

- a) Diperlukan adanya regulasi yang mampu menampung aspirasi yang berkembang yang dalam hal ini biaya transaksi yang mungkin ditimbulkan dalam proses pelayanan pada sistem pelayanan terpadu.
- b) Informasi, monitoring, dan kontrak sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pembuatan kebijakan pelayanan sistem terpadu oleh jajaran instansi pemerintah kabupaten sehingga tercipta kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat usaha.

Daftar Pustaka

- Bouty, Yuniaty, 2010, "Analisis Biaya Transaksi Ekonomi Dalam Desentralisasi Perpajakan (Studi UU No. 28 Tahun 2009 di Provinsi Gorontalo)", *Tesis*, Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. Penerbit Undip.
- Keputusan Presiden RI No 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2002, 2003, 2009, 2012. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta. KPPOD.
- LPEM FE UI. (2001). Construction of Regional Index of Doing Business in Indonesia: LPEM FE UI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Wihana Kirana Jaya, 2003. *Institutions Matter In Regional Autonomy Transition*. at the 5th IRSA International Conference, 18-19th July, 2003 Bandung Indonesia.
- Williamson, O.E., (2000), *The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead*, Journal of Economics Literature Vol.38 (3) 595-613.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

